



SIARAN PERS FESTIVAL HAM 2024

“Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional”

Bitung, 29 Juli 2024 - *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kantor Staf Presiden (KSP), tahun ini kembali menggelar Festival HAM. Tahun ini berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bitung sebagai tuan rumah yang berlangsung pada 29-31 Juli 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Tema pelaksanaan Festival HAM Tahun 2024 mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini yaitu **“Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”**. Pada sisi demokrasi dan pemenuhan HAM, dengan adanya pergantian Presiden dan Kepala Daerah, termasuk perangkat pemerintahan akan berdampak secara signifikan terhadap prioritas dan pendekatan terhadap bidang demokrasi dan HAM yang beririsan. Festival HAM 2024 merupakan forum strategis untuk menjawab persoalan HAM yang sesuai dengan konteks hari ini sehingga dapat menghasilkan agenda-agenda yang patut menjadi fokus dan atensi bersama pemerintah pusat hingga daerah. Termasuk bagaimana pemerintah ke depan harus menunjukkan dan menyelesaikan tanggungjawabnya dalam hal penyelesaian masalah HAM yang belum tuntas. Sedangkan dari sisi penguatan partisipasi masyarakat dari daerah hingga nasional merupakan upaya menciptakan ruang aman dan inklusif bagi masyarakat di perkotaan hingga ke desa-desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip HAM.

Selain itu, Festival HAM juga merupakan ruang inspirasi untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama tentang konsep Kabupaten/Kota berbasis HAM oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Festival HAM juga menjadi momentum untuk merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan pembangunan dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan budaya lokal oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia.

“Tak terasa Festival HAM 2024 menandai tahun ke-11 penyelenggaraannya sekaligus merayakan Satu Dekade Pertama yang telah kita lewati. Momentum ini penting untuk juga kita jadikan sebagai forum refleksi dan evaluasi bagi pemangku kewajiban maupun pemangku hak. Melalui Festival HAM 2024, mari kita uji *platform* ini sebagai arena untuk mempererat kolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan HAM yang terus berkembang. Sebagai pemangku kewajiban, pemerintah daerah perlu diberikan lebih banyak ruang untuk bertukar ide dan pengalaman baik dalam praktik HAM, khususnya dengan pimpinan daerah lain dan peluang kolaborasi bersama mitra kunci lainnya. Sementara sebagai pemangku hak, masyarakat dan komponen kelompok/komunitas sipil juga perlu diberikan aspirasi bagi substansi HAM tidak hanya yang normatif namun juga mencakup pengalaman keseharian masyarakat,” ujar Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM RI.

“Festival HAM sejak awal digagas oleh masyarakat sipil, sehingga acara ini harus menjadi kesempatan dan hak penuh setiap warga untuk belajar isu HAM, mendapat perlindungan dan pemajuan HAM, memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau solusi

atas segala permasalahan HAM di sekitar kita. Di tengah menurunnya skor indeks HAM dan demokrasi kita, masyarakat sipil tidak boleh diam. Negara pun harus menjadikan Festival HAM ini sebagai ajang refleksi dan menindaklanjuti catatan-catatan kritis dari masyarakat sipil menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih menghormati, memajukan, dan melindungi HAM,” tegas Khairani Arifin, Ketua Dewan Pengurus INFID.

Pada Festival HAM 2024 di Kota Bitung, Komnas HAM, INFID, KSP, dan Pemerintah Kota Bitung melibatkan komunitas lokal di Bitung melalui berbagai cara seperti partisipasi aktif, dengan mengundang komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai sesi diskusi paralel; kolaborasi dengan organisasi lokal, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok komunitas lokal untuk menyelenggarakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pra Festival HAM, yang mencakup Pelatihan Kabupaten/Kota HAM, *Goes to Campus*, Pelatihan HAM, Gender, dan HIV bagi *First Responder* Pemenuhan HAM Populasi Kunci, Konsultasi Publik *Online*, serta kegiatan serial Rembugan *Online* Masyarakat Sipil Sulawesi Utara – *Best Practice* Pemajuan HAM, Webinar Ekosistem HAM yang dilaksanakan oleh INFID, dan Diskusi Panel tentang Integrasi Hak Asasi Manusia, Perlindungan Perempuan, dan Anak dalam Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Pemkot Bitung; pemberdayaan ekonomi lokal dengan memastikan keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan logistik dan akomodasi; juga menyertakan pertunjukan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari acara untuk memperkenalkan kekayaan budaya Bitung kepada peserta.

Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM mengungkapkan jika Pemkot Bitung sangat bangga dengan ditunjuknya Bitung sebagai pelaksana Festival HAM ini. Terlebih Bitung merupakan kota di Indonesia Timur pertama yang menjadi tuan rumah Festival HAM. “Semoga Kota Bitung bisa menghasilkan poin-poin penting penuntasan kasus HAM dan Pelaksanaan HAM ke depan,” jelasnya. Pemkot Bitung sangat berharap Festival HAM ini menjadi forum bagi para pimpinan daerah untuk bertukar ide dalam pengalaman dan praktik baik pemenuhan HAM di wilayah masing-masing. “Setidaknya para pimpinan daerah bisa menjangkitkan praktik baik yang sudah dilakukan dan menciptakan peluang kolaborasi antarmitra serta Masyarakat,” lanjut Wali Kota Bitung Maurits Mantiri.

Lebih dari sepuluh tahun penyelenggaraan Festival HAM, dampak nyata yang ada yaitu sudah semakin banyak kabupaten/kota yang peduli dengan isu HAM dan menjadikan HAM sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan kemajuan konkret di daerah-daerah di Indonesia yang merupakan buah manis dari kegiatan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM yang dilakukan setiap tahun oleh INFID dan Komnas HAM. Kemajuan ini misalnya, terlihat dari lahirnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di beberapa wilayah terkait perlindungan anak, Perda bagi kelompok disabilitas, serta Perda perlindungan HAM lainnya.

Kantor Staf Presiden mengawal komitmen pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Beberapa di antaranya mengawal penuntasan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, undang-undang tentang penyandang disabilitas, Rencana Aksi Nasional HAM, dan yang terbaru Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM. Sementara, sejak 2017

keterlibatan aktif KSP di Festival HAM menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa sinergi dan berbagi pengalaman praktik baik dari banyak pihak salah satunya Pemerintah akan berdampak lebih banyak daerah yang terus berinovasi dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

“Penyelenggaraan Festival HAM menjadi episentrum untuk melakukan dialog, berbagi pengalaman praktik baik dari banyak daerah lain, termasuk menjadi proses refleksi terhadap kekurangan, kesalahan, atau kegagalan yang mungkin terjadi dari berbagai pihak. Terbuka dan terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi, yang berperspektif HAM, saya yakin dapat membawa kebaikan bagi seluruh warganya,” ungkap Rumadi Ahmad, Deputi V Kantor Staf Presiden yang dalam kesempatan tersebut mewakili Kepala Staf Kepresidenan.

Festival HAM bukan sekadar selebrasi dari praktik baik HAM di daerah, namun awal dari pemenuhan komitmen berkelanjutan untuk terus menggunakan nilai-nilai HAM sebagai dasar dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sampai jumpa di Festival HAM 2024 di Kota Bitung.

Narahubung:

1. Siska Rannywati P, Humas Komnas HAM RI, 082226800545
2. Intan Bedisa, Communication INFID, 08111231332/intanbedisa@infid.org
3. Hemas Psikolitikta, KSP RI, 0818980977/hemas.psikolitikta@ksp.go.id
4. (Pemkot Bitung)

Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tentang *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*:

INFID adalah organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk pembangunan Indonesia sejak 1985. INFID terakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyandang *Special Consultative Status* untuk ECOSOC di PBB. INFID memiliki tiga fokus program; 1) Penurunan Ketimpangan, 2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan 3) HAM & Demokrasi.

Tentang Kantor Staf Presiden RI:

Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan memiliki tugas dalam melakukan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. (Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019)

Tentang Pemerintah Kota Bitung:

Pemerintah Kota Bitung Periode 2021 - 2024 Walikota Ir. Maurits Mantiri, M.M., Wakil Walikota Hengky Honandar, S.E. dan Sekretaris Daerah: Ir. Ign. Rudy Theno, S.T., M.T.